

ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk membuktikan secara teoritis dan empiris, mengenai kejahatan struktural negar dan korporasi dengan menggunakan politik perampasan ruang hidup yang berdampak terhadap pemiskinan struktural dan teror ekologis. Selain itu, untuk melahirkan solusi konseptual pengaturan sumberdaya agraria masyarakat kepulauan, guna mengurangi dikotomi antara kepentingan masyarakat dengan negara. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara, sejak daerahnya dimekarkan menjadi kabupetan yang diikuti dengan gencarnya kampanye penyeragaman pembangunan, justru menghadapi polemik konflik struktural dengan kekuasaan yang ada di daerah. Warga petani dan nelayan ini dipaksa melepas tanah, hutan, laut, dan pulau mereka untuk kepentingan investasi ekstraksi oleh negara dan korporasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif.

Viktimisasi struktural terhadap masyarakat Kepulauan Maluku Utara melalui kapitalisasi sumberdaya agraria di era otonomi, masih menjadi polemik panjang kejahatan struktural yang dilakukan oleh negara dan korporasi (langsung maupun tidak langsung) hingga hari ini. Kemampuan warga lokal dalam mengelola dan mengatur sumberdaya agraria kemudian tergerus oleh sistem penguasaan dan pengaturan yang sentralistis. Pemerintah pusat melalui perpanjangan tangan kekuasaannya di daerah (pemerintah daerah)—yang secara teoritis dipandang dapat menampung aspirasi masyarakat lokal yang ada di daerah—justru bertindak tak lebih sebagai kaki tangan rezim dan modal. Langkah strategis adalah terus melibatkan warga lokal secara langsung dalam pengaturan sumberdaya agraria mereka, dan tidak hanya menjadikan mereka sebagai penonton atas setiap kebijakan pengelolaan sumberdaya agraria di kampung-kampung pesisir dan pulau-pulau kecil.